

Artikel penelitian

Analisis Harga Penjualan Gabah Kering Panen di Desa Wowasolo Kecamatan Wonggeduku Kabupaten Konawe

Nurcayah ^{a*}, Syamsinar^a, dan Basri Sufa^a,

^aProgram Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Muhammadiyah Kendari

Abstract

This study was conducted in October - November 2023, aiming to determine the cost of selling dry harvested grain and the minimum selling price of dry harvested grain in Wowasolo Village, Wanggeduku District, Konawe Regency. Data collection using a structured interview method with each respondent. The data analysis method used to calculate the total production costs is calculated using the formula $TC = FC + VC$, while to calculate the cost of goods sold the author uses the formula: Cost of goods sold (Rp / kg) = total cost (Rp) divided by the amount of production produced (Kg). To calculate the minimum selling price of dry harvested grain the author uses the formula: $10\% \times HPP$. The results of the study obtained the total cost of Rp. 6,431,989 / farmer and the cost of goods sold: Rp. 2.859 Kg / Kg. The minimum selling price of dry harvested grain obtained results of Rp. 3,145 / Kg. This farmer's HPP is much smaller than the HPP set by the government at IDR 4,200/kg (Decree of the Minister of Trade No. 24 of 2020

Keywords: *Cost of goods, sales, harvested dry grain*

Abstrak

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober – November 2023, bertujuan untuk mengetahui harga pokok penjualan gabah kering panen dan harga jual minimal gabah kering panen di Desa Wowasolo Kecamatan Wanggeduku Kabupaten Konawe.. Pengambilan data menggunakan metode wawancara terstruktur kepada setiap responden. Metode analisis data yang digunakan untuk menghitung total Biaya produksi dihitung dengan rumus $TC = FC + VC$, sedangkan untuk menghitung harga pokok penjualan penulis menggunakan rumus: Harga pokok penjualan (Rp/kg) = jumlah biaya keseluruhan (Rp) dibagi Jumlah produksi yang dihasilkan (Kg). Untuk menghitung Harga jual minimal gabah kering panen penulis menggunakan rumus: $10\% \times HPP$. Hasil penelitian di peroleh jumlah total biaya adalah Rp. 6.431.989 / petani dan harga pokok penjualan: sebesar Rp, 2,859 Kg /Kg. Harga jual minimal gabah kering panen di peroleh hasil sebesar Rp, 3.145 /Kg. HPP petani ini jauh lebih kecil dibanding HPP yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp.4.200,-/kg (SK Memperindag No.24 Tahun 2020.

Kata Kunci: *Harga pokok, penjualan, gabah kering panen*

*Korespondensi: Nurcayah

Fakultas Pertanian

Universitas Muhammadiyah Kendari

Jl. K.H. Ahmad Dahlan No. 10 Kel.

Wawowanggu, Kota Kendari,

Sulawesi Tenggara, 93117

✉ nurcayah@umkendari.ac.id

Sitasi Artikel

Nurcayah, Syamsinar, Basri Sufa. (2024). Analisis Harga Pokok penjualan Gabah Kering Panen di Kelurahan Liabuki di Kecamatan Bungi Kota Bau-bau. Agrisurya, 3(2): 5-10.

DOI:

[https://doi.org/](https://doi.org/10.51454/agrisurya.v3i2.894)

10.51454/agrisurya.v3i2.894

PENDAHULUAN

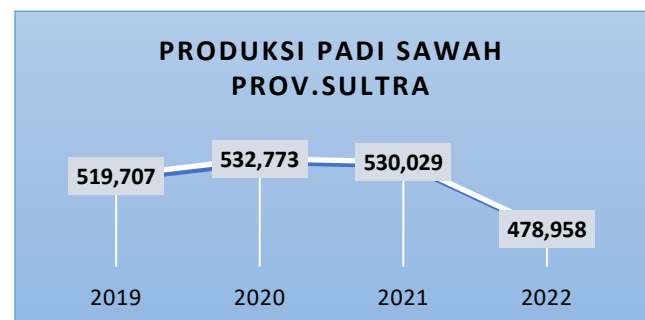
Padi merupakan komoditas yang sangat strategis dan penting untuk dikembangkan. Padi/beras mempunyai peran penting dalam perekonomian Indonesia karena mempunyai kontribusi yang cukup besar terhadap PDB Nasional, menciptakan ketahanan pangan, meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, serta meningkatkan kesejahteraan petani. Selanjutnya dengan meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia maka permintaan beras secara nasional meningkat, sehingga pemerintah berusaha secara terus menerus melakukan upaya untuk meningkatkan produksi.

Kebijakan khusus yang dapat merangsang petani dalam meningkatkan produksi yang dihasilkannya dapat melalui kebijakan *price support* seperti kebijakan harga dasar gabah (HDG) serta perangkat kebijakan lain yang kompherensif dan mendukung visi besar kebijakan harga dasar gabah tersebut. Melalui penetapan harga dasar gabah, pemerintah bermaksud untuk memberikan jaminan harga sehingga petani akan menjual gabah paling sedikit sesuai dengan HDG yang ditetapkan. Disamping itu, kebijakan harga dasar juga diharapkan mampu mewujudkan ketersediaan pangan dalam jumlah dan mutu yang memadai, dan dapat terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat (Arifin, 2001).

Kebijakan HPP adalah kebijakan yang dilaksanakan BULOG untuk membeli gabah/beras dengan jumlah tertentu kepada pihak petani/penggiling dengan harga yang ditetapkan pemerintah yang diharapkan dapat meningkatkan produksi beras dan kesejahteraan petani. Ada beberapa prokontra mengenai efektif atau tidaknya kebijakan HPP. antara lain (Ali et al., 2013) meneliti efektivitas kebijakan HPP di India dengan membandingkan antara di daerah dengan produksi beras yang tinggi dan produksi beras yang rendah dengan Variabel kebijakan HPP langsung diestimasi terhadap model luas area panen. Hasil studi ini menunjukkan bahwa di wilayah produsen beras di India kebijakan HPP efektif mempengaruhi produksi beras, sedangkan di wilayah yang produksi berasnya defisit HPP tidak efektif. (Sawit, 2013) mengatakan bahwa kebijakan HPP tidak efektif dalam mengatasi kendala produksi beras di Indonesia karena dominannya kebijakan harga tersebut dibandingkan dengan kebijakan untuk meningkatkan faktor-faktor lain yang mendukung produksi pertanian, seperti teknologi, saluran irigasi, perbaikan kualitas lahan, dan riset pengembangan. Anggapan tidak efektifnya kebijakan HPP juga datang dari Asosiasi Masyarakat Tani Padi (Amartapadi) yang menyatakan kebijakan HPP sudah tidak efektif karena harga gabah sudah berada cukup jauh di atas harga gabah (CNN, 2015).

Upaya pemerintah untuk menjaga kestabilan harga melalui kebijakan HPP tetap berjalan walaupun berbagai pro kontra. Salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan meningkatkan pendapatan petani adalah melalui Peraturan Menteri Perdagangan No 24 Tahun 2020 tentang menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk gabah dan beras yaitu (1) Harga pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah kering panen dengan kadar air maksimal 25%, kadar hampa/kotoran maksimal 10% sama dengan Rp 4.200/kg ditingkat petani dan Rp 4.250/kg ditingkat penggilingan. (2) Harga pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah kering giling kadar air maksimal 14%, kadar hampa/kotoran 3% sama dengan Rp 5.250/kg dipenggilingan dan Rp 5.300/kg digudang bolok. Dengan kebijakan HPP saat ini BULOG hanya mampu membeli beras petani jika harga dibawah HPP, jika diatas harga HPP, maka perusahaan milik pemerintah tersebut kesulitan menyerapnya, pemerintah seharusnya kembali menggunakan hanga dasar gabah sehingga BULOG bisa membeli gabah maupun beras petani. Kajian terkait hubungan HPP dengan harga gabah antara lain. (Suryana et al., 2014) menyatakan bahwa HPP dan harga gabah di pasar memiliki hubungan yang simultan atau tidak satu arah. Kondisi ini terjadi pada beberapa masa tertentu, ada kalanya karena harga pasar sudah terlalu tinggi, sehingga supaya BULOG tetap dapat melakukan pengadaan, HPP dinaikkan. Namun, ada kalanya HPP dinaikkan murni untuk mempengaruhi harga pasar, menjadi insentif bagi petani untuk berproduksi, dan meningkatkan kesejahteraan petani. Menurut Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menyatakan kebijakan HPP dengan nilai terakhir cukup menjaga stabilitas harga, melindungi tingkat pendapatan petani, dan pengamanan cadangan beras (Media Indonesia, 2016).

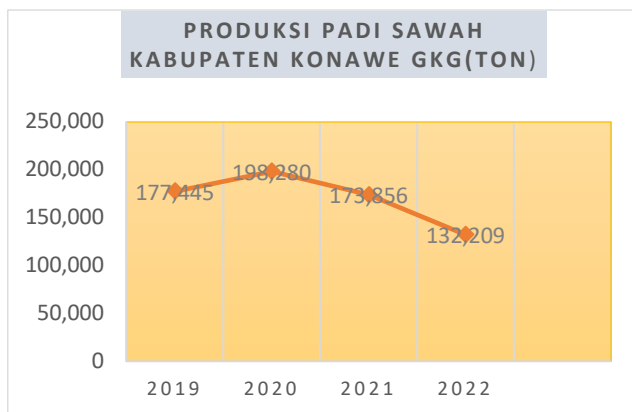
Provinsi Sulawesi Tenggara salah satu Provinsi yang memiliki produksi padi sawah yang fluktuatif pada tahun 2019 sampai tahun 2022.



Gambar 1. Produksi Padi sawah Padi Sawah Prov. Sulawesi Tenggara (GKG) ton

Berdasarkan Gambar 1 pada tahun 2019 produksi padi sawah sebesar 519.707 meningkat pada tahun 2020 menjadi 532.773 ton, namun penurunan yang cukup signifikan 478.958 ton/ha karena adanya perbaikan infrastruktur irigasi yang menyebabkan petani harus melakukan penanaman secara bergilir sehingga produksi padi sawah di Kabupaten Konawe sebagai sentra produksi padi Sawah di Provinsi Sulawesi Tenggara mengalami penurunan.

Produksi padi sawah Kabupaten Konawe memberikan kontribusi sebesar 18,54% terhadap total produksi padi sawah di Sulawesi Tenggara walaupun produksi cenderung fluktuatif karena faktor musim, hama juga karena adanya perbaikan instruktur irigasi di Kecamatan Wanggeduku sehingga proses penanaman dilakukan secara bergilir. Berikut gambar data produksi padi sawah Kabupaten Konawe.



Gambar 2. Produksi Padi Sawah Kab.Konawe Tahun 2019-2022 (BPS , 2023)

Berdasarkan Gambar 2 bahwa produksi padi sawah mengalami peningkatan tahun 2019 sampai tahun 2020 namun pada tahun 2022 produksi menurun akibat hama tikus yang cukup tinggi dan adanya perbaikan irigasi sehingga petani harus melakukan penanaman bergilir dengan Kelurahan Duriasi. Hal ini menyebabkan produksi menurun pada tahun 2022.

Salah satu desa penghasil padi Di Kabupaten Konawe adalah Desa wowasolo Kecamatan Wanggeduku dengan rata – rata produksi 5,6 ton per hektar sampai 10 ton per hektar. Produksi tersebut dapat menguntungkan petani padi sawah bila dijual pada tingkat harga diatas harga pokok gabah kering panen. Sedangkan kondisi harga gabah di Kecamatan Wanggeduku tergantung dari mutu dan kualitas gabah.

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti sangat tertarik mengetahui berapa Harga Pokok Penjualan (HPP) dan Harga Jual minimal Gabah Kering Panen (GKP) usahatani padi sawah di Desa

Wowasolo Kecamatan Wanggeduku Kabupaten Konawe

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Wowasolo Kecamatan Wanggeduku dan dilakukan mulai dari bulan Oktober - November Tahun 2023. Dipilihnya Desa dan kecamatan ini sebagai tempat penelitian dilakukan secara sengaja dengan pertimbangan bahwa Kecamatan Wanggeduku adalah salah satu daerah yang memiliki luas lahan panen padi yang terbesar di Kabupaten Konawe sebesar 6.343 ha. Sedangkan Desa Wowasolo adalah salah satu desa penghasil padi sawah di Kabupaten Konawe. Populasi dalam peneliti ini adalah seluruh petani padi sawah di Kelurahan Wowasolo Kecamatan Wanggeduku Kabupaten Konawe yang berjumlah 246 petani. Penentuan jumlah sampel menggunakan rumus slovin 25 sampel dari 246 populasi (Husein 2013): Variabel dalam penelitian ini Identitas responden petani yang meliputi : umur, tingkat pendidikan, pengalaman usahatani padi, dan jumlah tanggungan keluarga. Karakteristik usahatani padi meliputi : luas lahan,biaya tetap, biaya variabel, dan produk GKP (kg).

Untuk menghitung HPP diperlukan beberapa analisa biaya tetap maupun tidak tetap dan analisa harga penjualan gabah kering diuraikan pada sub-sub berikut:

• Analisis biaya

Menurut Rodjak (2006) untuk menghitung besarnya biaya total diperoleh dengan cara menjumlahkan biaya tetap dengan biaya variabel dengan rumus sebagai berikut:

$$TC = FC + VC$$

Keterangan :

TC = Total Cost/Pengeluaran Total

FC = Fixed Cost/Biaya Tetap

VC = Variable Cost/Biaya Variabel

• Analisis penentuan Harga Pokok Penjualan (HPP) gabah kering panen

$$HPP(Rp/kg) = \frac{Jumlah\ biaya\ keseluruhan\ (Rp)}{Jumlah\ Produksi\ yang\ dihasilkan\ (kg)}$$

• Analisis penentuan harga jual minimal rumus: 10% x HPP

Analisis penentuan harga Pokok penjualan (HPP)

Menurut Kotler, P dan G Amstrong (2006) di simpulkan bahwa HPP adalah harga/nilai produk

dalam kondisi tidak untung maupun rugi atau dengan kata lain kondisi *break even poin*(BEP) di tingkat pasar. Kondisi ini dapat di rumuskan sebagai berikut (Suratijah, 2006)

$$\text{BEP harga (Rp/kg)} = \frac{TC}{Y}$$

Keterangan:

BEP Harga yaitu Harga Pokok Penjualan di tingkat produsen (=HPP)

Total Cost (TC) yaitu seluruh biaya yang dikeluarkan dalam suatu proses produksi (biaya produksi) ditambah biaya-biaya lain sampai ditempat penjualan (biaya pewadahan, Packing, angkutan dan buruh), dihitung dalam satuan.

Y (yield)yaitu jumlah produksi dalam sekali proses produksi di hitung dalam satuan (kg).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Identitas Responden

Umur

Hasil penelitian menunjukan bahwa sebanyak 21 orang petani responden atau 87,5% dari keseluruhan petani responden berada pada usia produktif. Sedangkan 3 orang petani responden atau 14,2% dari keseluruhan petani responden berada pada usia kurang produktif. Artinya bahwa rata-rata petani memiliki kemampuan secara fisik dalam mengembangkan usahatani.

Tingkat Pendidikan Petani Responden

Hasil penelitian menunjukan bahwa 13 orang petani responden atau 52 % dari keseluruhan responden memiliki pendidikan formal di tingkat sekolah dasar (SD), sedangkan masing-masing di tingkat pendidikan SMP dan SMA memiliki jumlah 12 orang atau 48% petani responden.

Hal ini menunjukan bahwa dengan adanya pendidikan seseorang akan lebih banyak memperoleh pengetahuan atau informasi, sehingga mudah berfikir terhadap suatu kegiatan yang di kelolanya, namun pada umumnya responden memiliki tingkat pendidikan yang rendah sehingga berdampak pada rendahnya penciptaan inovasi dalam meningkatkan nilai tambah usahatani.

Pengalaman Berusahatani Petani Responden

Dengan pengalaman yang cukup juga, akan mempengaruhi pengambilan keputusan, baik tidaknya keputusan yang di ambil petani akan berdampak pada hasil yang akan di peroleh. Sehingga hasil yang di peroleh akan mempengaruhi tingkat pendapatan responden. Untuk mengetahui pengalaman

berusahatani petani responden dapat di lihat pada tabel berikut.

Berdasarkan hasil penelitian terlihat bahwa ke 21 petani responden termasuk dalam kategori petani yang sangat berpengalaman lebih dari 10 tahun, dan 4 orang yang memiliki pengalaman dibawah 10 tahun artinya tingkat pengalaman yang tinggi menjadi pembelajaran bagi petani dalam mengelola atau mengatasi masalah yang dihadapi dalam berusahatani.

Analisis Harga Pokok Penjualan (HPP) Gabah Kering Panen

Menurut Manulang (1996), harga pokok penjualan adalah jumlah biaya yang seharusnya untuk memproduksi suatu barang di tambah biaya seharusnya dan lainnya

Biaya Produksi

Biaya pada usahatani padi sawah sampai menjadi Gabah Kering Panen terdiri dari biaya tetap dan biaya tidak tetap. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh struktur biaya usahatani padi sawah sampai menjadi Gabah Kering Panen di Kelurahan Wowasolo Kecamatan Wanggeduku dapat di lihat pada Tabel 4 berikut.

Tabel 4. Struktur Biaya Usahatani Padi Sawah Sampai Menjadi Gabah Kering Panen Di Kelurahan Liabuku, Tahun 2022 (per petani/).

| Uraian | Biaya Total (Rp) | Rerata Biaya (Rp) |
|----------------------|------------------|-------------------|
| Biaya Tetap | 28.745.845 | 1.306.629 |
| Biaya variabel | 128.134.000 | 5.125.360 |
| Total Biaya Produksi | 156.879.845 | 6.431.989 |

Sumber: *Data primer diolah, 2023*

Tabel 4. menunjukkan bahwa biaya produksi usaha tani padi sawah di Kelurahan Wowasolo rata-rata biaya produksi sebesar Rp. 6.431.989 per petani dalam satu kali musim tanam. Biaya tetap rata-rata sebesar Rp. 1.306.629 dan biaya variable dengan rata-rata Rp. 5.125.360 per petani. Biaya variabel terbesar adalah biaya sewa traktor.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil produksi padi sawah berupa gabah kering panen (GKP) tercatat total produksi petani responden berjumlah 56.250 Kg dengan rata-rata per-petani sebesar 2,250 Kg. Oleh karena itu rata-rata harga pokok produksi Gabah Kering Panen per kilogram adalah Rp. 6.431.989/ 2.250 Kg sama dengan Rp.

2.859/Kg, sedangkan konversi GKP ke GKG dan GKG ke beras (nilai konversi GKP ke GKG adalah 86,02%, sedang GKG ke Beras adalah 62,74%, atau sekitar nilai konversi 54% dari GKP ke Beras. Dengan demikian jumlah produksi dari hasil konversi GKP ke beras sebesar 1.215 kg dengan HPP beras Rp. 5.293.82/kg.

Harga pokok penjualan gabah kering panen di tingkat petani di Kelurahan Wowasolo Rp. 2.859/Kg, sedangkan harga pokok penjualan (GKP) ditingkat pemerintah seharga Rp. 4.200/Kg masih di bawah harga pembelian pemerintah sedangkan HPP beras ditingkat petani sebesar Rp. 5.293.82/Kg lebih tinggi dari HPP pemerintah sebesar Rp. 4.758 . sesuai SK Menteri Perdagangan No 24 tahun 2020 tentang penetapan Harga Pembelian Pemerintah untuk gabah dan beras. Harga HPP Gabah Kering Panen (GKP) seharga Rp. 4.200/Kg, dan gabah kering Giling (GKG) seharga Rp. 4.758/Kg di tingkat petani.

Perbedaan HPP ditingkat petani dengan pemerintah karena Biaya produksi tersebut di perhitungkan di tempat pengepul gabah, tetapi karena transaksi penjualan gabah kering panen di lakukan di tempat yang sama maka dapat dikatakan bahwa biaya produksi tersebut adalah sama dengan nilai dari harga pokok penjualan (HPP). Oleh sebab itu HPP gabah kering panen di Kelurahan Wowasolo Kecamatan Wanggeduku adalah sebesar Rp. 2.859/Kg lebih rendah dari HPP pemerintah, sedangkan HPP beras ditingkat petani lebih tinggi dibanding HPP pemerintah.

Oleh karena itu apabila petani lebih untung menjual dalam bentuk produksi dengan beras dibanding gabah kering panen. Hal ini menunjukkan bahwa Kebijakan HPP dapat meningkatkan Keuntungan yang dapat mendorong Peningkatan produksi di Desa Wowasolo.

Analisis Harga Jual Gabah Kering Panen

Menurut Satriono (2006) harga jual komoditi minimal adalah 10% di atas nilai harga pokok penjualan termasuk dengan biaya resiko. Biaya resiko sangat relatif namun tidak diperhitungkan dalam penelitian ini karena penjualan berlangsung di tempat pengepul gabah sehingga tidak ada resiko susut. Perhitungan nilai jual minimal dapat dihitung dengan rumus:

$$\begin{aligned} \text{HPP minimum} &= 10\% \times \text{HPP}; \text{HPP} = \text{Rp. 2.859/Kg} \\ &= 10\% \times \text{HPP} \\ &= 10\% \times \text{Rp 2.859/Kg} = \text{Rp. 285,9} \end{aligned}$$

Harga jual minimum = Rp. 2.859/Kg + Rp. 285,9/Kg = Rp. 3.145/Kg. harga tersebut seharusnya di tambah dengan nilai resiko, yang sesungguhnya

bukan saja untuk menutup kemungkinan penyusutan fisik namun juga nilai uang berdasarkan waktu serta biaya sosial lainnya yang diperlukan petani. Namun sebagaimana telah di kemukakan sebelumnya faktor resiko belum di perhitungkan dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penelitian Harga Pokok Penjualan (HPP) gabah kering panen di Kelurahan Wowasolo sebesar Rp. 2.859/Kg lebih rendah dibanding HPP pemerintah. Hal yang sama dalam (Mandei et al., 2019) bahwa penentuan harga pokok beras di Kecamatan Kotamobagu rata-rata sebesar Rp. 4.961,56/Kg, Selanjutnya hal yang berbeda dalam penelitian (Noviasari et al., 2014) mengenai harga pokok penjualan beras pada PT Barokah Makmur, Kec, Samboja, Kab.Kutai Kartanegara sebesar Rp. 7.500,-perkilogram. Adanya persamaan dan perbedaan yang terjadi tergantung produktivitas produksi masing- masing daerah dan kurang informasi harga bagi petani terkait kebijakan pemerintah tentang harga beli yang diterima BULOG sehingga harga petani tergantung penawaran yang diberikan oleh tengkulak. Hal sesuai penelitian (Sriwinarti & Hasanah, 2020) Pengetahuan petani terkait HPP rendah bahwasanya mayoritas para petani tidak tahu mengenai kebijakan pemerintah mengenai harga beli yang diterima oleh BULOG dan bagaimana cara melakukan transaksinya, selain itu kebanyakan para petani menjual tanaman padi dengan hitungan per are sedangkan proses *ngerampek* dilakukan oleh para tengkulak sehingga para petani hanya berpaku terhadap penawaran dari para tengkulak/saudagar.

KESIMPULAN

Kesimpulan dalam hasil penelitian ini yaitu Harga pokok penjualan gabah kering panen di tingkat petani di Kelurahan Wowasolo Rp. 2.859/Kg, sedangkan harga pokok penjualan (GKP) ditingkat pemerintah seharga Rp. 4.200/Kg masih di bawah harga pembelian pemerintah sedangkan HPP beras ditingkat petani sebesar Rp. 5.293.82/Kg lebih tinggi dari HPP pemerintah sebesar Rp. 4.758. Oleh karena itu petani lebih menguntungkan menjual dalam bentuk beras dibanding gabah kering panen.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, S. Z., Sidhu, R. S., & Vatta, K. (2013). Effectiveness of Minimum Support Price Policy for paddy in India with a case study of Punjab. *Agricultural Economics Research Review*, 25 (2), 231–242. <http://ageconsearch.umn.edu>.

- Amstrong, G, dan Kotler, P. (2006). Prinsip-Prinsip Pemasaran. Alih Bahasa Sabaran. Jakarta: Erlangga.
- Ariefinsyah, R. dan M.M Utama. (2012). Cara instan membuat HPP dengan praktis. Jakarta: New Agogos.
- Arifin, B. (2001). Pertanian Era Transisi. Lampung: Universitas Lampung.
- Arikunto, (2005). Manajemen Penelitian. Jakarta: Rieneka Cipta.
- BPS (2023). Produksi Padi di Sulawesi Tenggara Menurut Kabupaten/Kota (Ton GKG) (Ton), 2019-2022. In Sultra.Bps.Go.Id
- Husein.U. (2013). Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis. Cetakan ke-6. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kadariah. (1994). Teori Ekonomi Makro. Jakarta
- Kartasapoetra. (1988). Pengantar Ekonomi Produksi Pertanian. Jakarta: Bina Aksara.
- Kotler, P., 2002. Manajemen Pemasaran. Bandung: ITB.
- Mandei, J. R., Ngangi, C. R., & Iskandar, J. N. (2019). Penentuan Harga Pokok Beras DI Kecamatan Kotamobagu Timur Kota Kotamobagu. 7, 15–21.
- Noviasari, I., Jonathan, R., & Ruliana, T. (2014). Analisis Harga Pokok Penjualan Beras pada PT Barokah Makmur, Kec. Samboja, Kab. Kutai Kartanegara.
- Rodjak. (2006). Manajemen Usaha Tani. Bandung: Pustaka Giratuna bandung Fakultas Pertanian Universitas Padjajaran.
- Satriono dan A. Supryono. (2006). Padi. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Sawit, M. H. (2013). Kebijakan Swasembada Beras: Keinginan Besar yang Kehilangan Fokus, Rice Self-sufficiency Policy: Big Desire but Losing Focus. Pangan, 22 (2), 375–386.
- Sriwinarti, N. K., & Hasanah, U. (2020). Penentuan Harga Pokok Gabah: Analisis Berdasarkan Musim Tanam. Riset, Ekonomi, Akuntansi dan Perpajakan (Rekan), 1(1), 32–40. <https://doi.org/10.30812/rekan.v1i1.662>
- Suryana, A., Rachman, B., & Hartono, D. (2014). Dinamika Kebijakan Harga Gabah Dan Beras Dalam Mendukung Ketahanan Pangan Nasional. Pengembangan Inovasi Pertanian, 7, 155–168.
- Suratiah, K. (2006). Ilmu Usahatani. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Winardi. (1981). Pengantar Ekonomi Perusahaan. Bandung: Tarsito.
- Zacky, A. (2007). Peramalan dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Fluktuasi Harga Beras IR II Tingkat Konsumen di Beberapa Kota Besar di Pulau Jawa dan Bali. Bogor: IPB.